

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI  
DENGAN  
PT.LUCKY MEDICAL INDONESIA  
TENTANG  
PELAYANAN DAN PENYEDIAAN OBAT-OBATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI  
(BMHP) DAN ALAT KESEHATAN**

---

Nomor : 000.4.7.2<sup>p42</sup> /RSUD-LB  
Nomor : 002/LMI/MOU/I/2025



Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (24 - 02 - 2025) di **Makassar**, bahwa yang bertandatangan dibawa ini:

- I. **dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 821.22/15/2023 tanggal 10 Juli 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **dr. Lucky Frannata**, selaku direktur PT Lucky Medical Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Lemponsari Raya G No.154, RT.08/RW.23, Wonorejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Lucky Medical Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA** dan **PIHAK** masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**PIHAK KEDUA** diberikan wewenang oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan pelayanan dan penyediaan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan kepada **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Pemberian pelayanan dan penyediaan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan Alat Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** baik melalui resep maupun surat pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**,
2. Guna pelaksanaan kegiatan pelayanan dimaksud di atas, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek yang masih berlaku

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana di uraikan sebagai berikut:

**I. Hak PIHAK KESATU**

- a. Menerima Pelayanan dan penyediaan obat-obatan, BMHP, dan Alkes dari **PIHAK KEDUA**,
- b. Menerima informasi ketersediaan data obat-obatan, BMHP, dan Alkes dari **PIHAK KEDUA**,
- c. Menerima obat-obatan dalam keadaan baik, cukup, dan terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**II. Kewajiban PIHAK KESATU**



Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat **Empat Puluh Lima Hari** setelah berkas diterima

**III. Hak PIHAK KEDUA**

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** paling lambat **Empat Puluh Lima Hari** setelah berkas diterima
- b. Menghentikan sementara pelayanan jika pembayaran belum diterima hingga batas waktu yang ditetapkan.

**IV. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan Pelayanan dan penyediaan obat-obatan, BMHP, dan Alkes dari **PIHAK KEDUA**,
- b. Memberikan informasi ketersediaan data obat-obatan, BMHP, dan Alkes dari **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Memberikan obat-obatan dalam keadaan baik, cukup, dan terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### PASAL 4

##### HARGA OBAT-OBATAN, BMHP, DAN ALKES

1. Obat-obatan, BMHP, dan Alat Kesehatan yang terdapat dalam LKPP, maka menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{HJA} = \text{Harga LKPP} + \text{Margin } 12\%$$

Ket :

HJA : Harga Jual Apotek

2. Obat-obatan, BMHP, dan Alkes yang tidak terdapat dalam LKPP, maka Harga Jual Apotek akan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{HJA} = \text{HNA} + \text{PPN}11\% + \text{Margin } 12\%$$

Ket :

HJA : Harga Jual Apotek

HNA : Harga Netto Apotek

#### PASAL 5



##### KETENTUAN DALAM KLAIM TAGIHAN

1. Klaim tagihan dilakukan **PIHAK KEDUA** disertai dengan dokumen yang terdiri atas
  - a. Surat Pengantar Tagihan
  - b. Kwitansi Rangkap 2
  - c. Rekapitulasi tagihan
2. Klaim tagihan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
3. **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran atas klaim tagihan dari **PIHAK KESATU** paling lambat Empat Puluh lima Hari sejak klaim tagihan diterima **PIHAK KESATU**

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 25 Februari 2025 dan berakhir 25 Februari 2026.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, tidak ada konfirmasi dari kedua pihak maka secara otomatis jangka waktu PKS ini diperpanjang selama 6 (enam) bulan

#### PASAL 7

#### KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau **kekuasaan PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah, dan apabila dengan cara musyawarah tidak dicapai kata sepakat maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

**PASAL 9**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan lain – lain sehubungan dengan perjanjian ini ditujukan ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU:**

RSUD Labuang Baji

Alamat : Jl. DR. Ratulangi No.81, Kota Makassar

Telepon : (0411) 873482

Email : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

PIC : dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes

No Tlp/WA : 081216045566

b. **PIHAK KEDUA :**

PT.LUCKY MEDICAL INDONESIA

Alamat : Jalan Lemponsari Raya G No.154, RT.08/RW.23, Wonorejo, Sariharjo,  
Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581



Telepon : 0274 - 2253117

Email : luckymedicalindonesia@gmail.com

PIC : dr. Lucky Frannata

No Tlp/WA : 0811-297-879

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan :
  - a. Tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

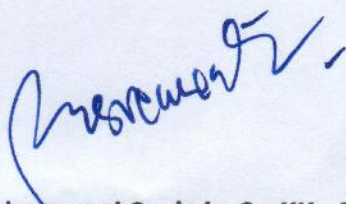
- b. Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat, atau
  - c. Sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang mana yang lebih dulu
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan / atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka alamat, nomor telepon dan / atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

Apabila ada tambahan pasal-pasal dalam perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk addendum.

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tertulis di atas serta ditandatangani oleh para pihak dengan materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

**PIHAK KESATU**  
UPT RSUD Labuang Baji



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
PT.LUCKY MEDICAL INDONESIA



dr. Lucky Frannata  
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
